

Dampak Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat Indonesia

Nur Asia¹, Ahmad Jumadil², Fitriani Syukri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Parepare

nuraisa3002@gmail.com¹, ahmadjumadil151004@gmail.com², fitriyanisyukri19@gmail.com³

Info Artikel

Kata kunci:

Inflasi, Daya Beli Masyarakat, Ekonomi Makro, Konsumsi Rumah Tangga, Kebijakan Ekonomi.

ABSTRACT

Inflation is a key macroeconomic indicator affecting economic stability and public welfare. A general and sustained rise in the prices of goods and services can erode public purchasing power if not matched by a corresponding increase in income. This study aims to analyze the impact of inflation on the purchasing power of the Indonesian population, identify the factors driving inflation, and examine strategies for controlling inflation to maintain economic stability. A qualitative approach utilizing library research was employed. The study relies on secondary data obtained from scholarly articles, books, and official reports from national and international institutions regarding inflation and public purchasing power. Data collection was conducted through document review, while analysis utilized content analysis techniques to identify, categorize, interpret, and synthesize relevant information. The findings indicate that inflation in Indonesia is driven by various factors, such as rising consumer demand, increased production costs, exchange rate fluctuations, supply chain disruptions, and global economic dynamics. Inflation rates exceeding income growth lead to a decline in real income, thereby weakening public purchasing power. These impacts are reflected in shifts in household consumption patterns, increased economic vulnerability among low-income groups, and declining performance of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), as well as the potential to slow national economic growth. Consequently, the synergy between monetary and fiscal policies, the strengthening of food security, improvements to distribution systems, and the protection of vulnerable groups constitute strategic measures to control inflation, preserve public purchasing power, and support sustainable economic growth.

ABSTRAK

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dapat menurunkan daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inflasi, serta mengkaji strategi pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah, buku, serta laporan resmi lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan inflasi dan daya beli masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mensintesis informasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, fluktuasi nilai tukar, gangguan rantai pasok, dan dinamika

ekonomi global. Inflasi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan menyebabkan penurunan pendapatan riil sehingga daya beli masyarakat melemah. Dampak tersebut tercermin pada perubahan pola konsumsi rumah tangga, meningkatnya kerentanan ekonomi kelompok berpendapatan rendah, menurunnya kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sinergi kebijakan moneter dan fiskal, penguatan ketahanan pangan, perbaikan sistem distribusi, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan menjadi langkah strategis dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki peran penting dalam menggambarkan stabilitas perekonomian suatu negara. Secara umum, inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali dapat menjadi sinyal adanya pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali berpotensi mengurangi nilai riil pendapatan masyarakat, meningkatkan biaya hidup, serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Bank Indonesia, 2024; Mankiw, 2021).

Di Indonesia, dinamika inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan harga komoditas pangan, kenaikan harga energi, depresiasi nilai tukar rupiah, peningkatan permintaan masyarakat, gangguan rantai pasok, serta kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan inflasi semakin kompleks akibat dampak pandemi COVID-19, konflik geopolitik global, perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan, serta ketidakstabilan harga energi dunia. Kondisi tersebut menyebabkan harga berbagai kebutuhan pokok mengalami peningkatan sehingga memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Bank Indonesia, 2024; Badan Pusat Statistik, 2025; International Monetary Fund, 2024).

Salah satu dampak utama inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa berdasarkan tingkat pendapatan yang dimiliki. Ketika laju kenaikan harga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan, maka pendapatan riil masyarakat akan mengalami penurunan sehingga konsumsi rumah tangga menjadi terbatas. Kondisi ini paling dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, dan energi (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2024; World Bank, 2024).

Penurunan daya beli masyarakat memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian nasional. Konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apabila daya beli masyarakat menurun akibat inflasi yang tinggi, maka konsumsi rumah tangga cenderung melemah sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2025; Bank Indonesia, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan negatif terhadap daya beli masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Mankiw (2021) menjelaskan bahwa inflasi yang berkepanjangan menyebabkan penurunan pendapatan riil sehingga konsumsi masyarakat cenderung menurun. Sementara itu, World Bank (2024) melaporkan bahwa lonjakan harga pangan dan energi memberikan tekanan yang lebih besar kepada rumah tangga miskin dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Penelitian OECD (2024) juga menemukan bahwa inflasi menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat dengan mengurangi pembelian barang nonprimer dan meningkatkan pengeluaran untuk kebutuhan dasar.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara inflasi dan daya beli masyarakat, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai besarnya pengaruh inflasi terhadap berbagai kelompok pendapatan di Indonesia. Sebagian penelitian lebih banyak berfokus pada aspek makroekonomi, sedangkan kajian yang mengintegrasikan perkembangan inflasi terkini, kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, serta kebijakan pemerintah pascapandemi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menyajikan kajian literatur yang lebih komprehensif mengenai dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia berdasarkan berbagai sumber empiris terbaru.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia melalui pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai ekonomi makro serta menjadi

bahan pertimbangan bagi pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas daya beli masyarakat demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan inflasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa stabilitas harga menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meskipun tingkat inflasi nasional secara umum masih berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Bank Indonesia, gejolak harga pada kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile food*) dan harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) masih sering terjadi. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat menjadi penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang efektif (Bank Indonesia, 2025; Badan Pusat Statistik, 2025).

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital dan globalisasi turut memengaruhi mekanisme pembentukan inflasi di Indonesia. Integrasi pasar internasional menyebabkan perubahan harga komoditas dunia, nilai tukar, serta gangguan rantai pasok global dapat dengan cepat memengaruhi harga barang dan jasa di dalam negeri. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memanfaatkan perdagangan berbasis digital juga memberikan dinamika baru terhadap distribusi barang dan pembentukan harga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya memerlukan kebijakan moneter yang tepat, tetapi juga penguatan sektor riil, efisiensi sistem distribusi, serta peningkatan ketahanan pangan nasional agar tekanan inflasi dapat diminimalkan (International Monetary Fund, 2024; World Bank, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya menguraikan hubungan antara inflasi dan daya beli dari perspektif teori ekonomi makro, tetapi juga mengintegrasikan berbagai data empiris dan publikasi resmi terbaru untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi referensi dalam perumusan kebijakan yang mendukung stabilitas harga, peningkatan daya beli, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2024; Bank Indonesia, 2025).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia melalui pengkajian berbagai literatur ilmiah, data statistik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena ekonomi berdasarkan berbagai sumber yang kredibel dan relevan (Creswell & Creswell, 2023; Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah, seperti artikel jurnal nasional dan internasional, buku ekonomi makro, laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, World Bank, International Monetary Fund (IMF), serta publikasi lembaga lain yang berkaitan dengan inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi dalam kurun waktu 2021–2025 agar dapat menggambarkan perkembangan kondisi ekonomi terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mencatat berbagai informasi yang relevan dari sumber-sumber pustaka. Proses pengumpulan data difokuskan pada informasi mengenai perkembangan tingkat inflasi, faktor-faktor penyebab inflasi, perubahan daya beli masyarakat, dampak inflasi terhadap konsumsi rumah tangga, serta kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) mengidentifikasi dan menyeleksi literatur yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, meliputi penyebab inflasi, perkembangan inflasi di Indonesia, dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat, serta kebijakan pengendalian inflasi; (3) membandingkan dan menginterpretasikan hasil penelitian terdahulu dengan data empiris yang diperoleh dari lembaga resmi; dan (4) menyusun sintesis hasil analisis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai hubungan antara inflasi dan daya beli masyarakat Indonesia (Krippendorff, 2019; Creswell & Creswell, 2023).

Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah dan dokumen resmi sehingga data yang digunakan memiliki tingkat kredibilitas dan konsistensi yang tinggi. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga mampu memberikan gambaran mengenai

dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi nasional.

Selain menerapkan triangulasi sumber, penelitian ini juga menggunakan teknik evaluasi kritis terhadap setiap literatur yang dijadikan rujukan. Proses evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas penulis atau lembaga penerbit, tahun publikasi, serta kesesuaian data dengan kondisi perekonomian Indonesia. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dianalisis berasal dari sumber yang valid, mutakhir, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, sintesis yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan fenomena inflasi secara teoritis, tetapi juga mencerminkan perkembangan ekonomi Indonesia berdasarkan data dan informasi terkini (Yin, 2023; Bank Indonesia, 2025).

Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi makro, temuan penelitian terdahulu, serta data empiris yang diperoleh dari lembaga resmi. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi keterkaitan antara tingkat inflasi, perubahan daya beli masyarakat, dan implikasinya terhadap berbagai sektor ekonomi secara lebih komprehensif. Penyajian hasil penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis sehingga tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap hubungan antarkonsep sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi yang relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini (Hair et al., 2021; Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam ekonomi makro yang mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Kenaikan harga yang hanya terjadi pada satu atau beberapa komoditas tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi apabila tidak menyebabkan peningkatan harga secara umum. Inflasi yang berada pada tingkat rendah dan stabil umumnya dianggap sebagai kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi karena dapat mendorong aktivitas produksi dan investasi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menurunkan nilai riil uang, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, serta mengurangi kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2021; Mishkin, 2022).

Inflasi pada dasarnya merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas perekonomian modern. Hampir seluruh negara mengalami inflasi dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kondisi ekonomi masing-masing. Yang menjadi perhatian bukanlah keberadaan inflasi itu sendiri, melainkan tingkat dan kestabilannya. Inflasi yang rendah dan terkendali mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat karena memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menentukan harga, melakukan investasi, serta merencanakan kegiatan produksi. Sebaliknya, inflasi yang berfluktuasi secara tajam akan meningkatkan ketidakpastian sehingga dapat mengganggu aktivitas konsumsi, investasi, maupun perdagangan (Samuelson & Nordhaus, 2022).

Di Indonesia, tingkat inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengendalian inflasi menjadi salah satu sasaran utama kebijakan moneter Bank Indonesia karena stabilitas harga merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Bank Indonesia, 2024).

Dalam praktiknya, inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, seperti kebijakan fiskal dan moneter, kondisi pasar tenaga kerja, perubahan nilai tukar, serta dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, analisis terhadap inflasi perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Tingkat inflasi yang mampu dijaga pada kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kepercayaan investor, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan konsumsi maupun investasi (Bank Indonesia, 2024; IMF, 2024).

Selain berfungsi sebagai indikator stabilitas ekonomi, inflasi juga menjadi salah satu dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah dan Bank Indonesia secara berkala melakukan pemantauan terhadap perkembangan inflasi untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang tepat dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menjaga kenaikan harga tetap terkendali, tetapi juga berperan penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Bank Indonesia, 2024; OECD, 2024).

3.2. Faktor-Faktor Penyebab Inflasi di Indonesia

Inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik maupun global. Dari sisi permintaan (demand-pull inflation), inflasi terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan kapasitas produksi. Dari sisi penawaran (cost-push inflation), kenaikan biaya produksi

seperti harga energi, bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya distribusi mendorong produsen menaikkan harga jual produk (Samuelson & Nordhaus, 2022).

Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turut memengaruhi harga barang impor, terutama bahan baku industri. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh gangguan rantai pasok global, perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan, serta konflik geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga energi dan komoditas dunia (IMF, 2024; World Bank, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global.

Disamping faktor-faktor tersebut, kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi pergerakan inflasi, terutama melalui penyesuaian harga barang dan jasa yang diatur pemerintah (*administered prices*), seperti bahan bakar minyak, tarif listrik, tarif angkutan, dan harga gas. Ketika pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga komoditas strategis tersebut, dampaknya tidak hanya dirasakan pada kenaikan harga komoditas yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi biaya produksi dan distribusi berbagai sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Karakteristik struktur perekonomian Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat inflasi. Perekonomian nasional masih memiliki ketergantungan terhadap sejumlah komoditas strategis, terutama bahan pangan, sehingga gangguan produksi akibat perubahan cuaca, bencana alam, maupun hambatan distribusi dapat menyebabkan pasokan barang di pasar berkurang dan harga mengalami kenaikan. Kondisi ini sering terjadi pada komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan inflasi nasional. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas, modernisasi sistem logistik, serta perbaikan infrastruktur distribusi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi, khususnya pada kelompok *volatile food* (Badan Pusat Statistik, 2025; Bank Indonesia, 2025).

Perkembangan ekonomi global turut memberikan tantangan dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Perubahan harga minyak dunia, kebijakan suku bunga bank sentral negara maju, fluktuasi harga komoditas internasional, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik dapat memengaruhi arus perdagangan, investasi, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan harga barang impor, tetapi juga mendorong kenaikan biaya produksi berbagai sektor industri di dalam negeri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sektor riil yang didukung oleh koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Bank Indonesia agar tekanan inflasi dapat diminimalkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mempertahankan daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (IMF, 2024; World Bank, 2024).

3.3. Dampak Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh barang dan jasa berdasarkan tingkat pendapatan yang dimiliki. Inflasi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan akan menurunkan pendapatan riil sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi berkurang (OECD, 2024).

a. Penurunan Pendapatan Riil

Kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan nilai riil pendapatan masyarakat menurun. Walaupun pendapatan nominal tetap atau mengalami peningkatan, daya beli masyarakat akan tetap berkurang apabila kenaikan pendapatan tidak mampu mengimbangi laju inflasi. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat harus mengurangi konsumsi atau mengubah pola pengeluarannya (Mankiw, 2021).

Penurunan pendapatan riil memberikan dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan rumah tangga karena kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi semakin terbatas. Dalam kondisi inflasi yang tinggi, sebagian besar pendapatan akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga ruang untuk menabung maupun berinvestasi menjadi semakin kecil. Apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka kualitas hidup masyarakat dapat menurun karena berkurangnya kemampuan dalam membiayai pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan produktif lainnya. Oleh karena itu, stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat (OECD, 2024; Bank Indonesia, 2024).

b. Perubahan Pola Konsumsi Rumah Tangga

Inflasi mendorong masyarakat untuk memprioritaskan pengeluaran pada kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sebaliknya, konsumsi terhadap barang sekunder maupun tersier cenderung menurun. Perubahan pola konsumsi tersebut berdampak pada melemahnya permintaan terhadap berbagai sektor usaha, khususnya sektor perdagangan dan jasa (World Bank, 2024).

Perubahan pola konsumsi juga menunjukkan adanya penyesuaian perilaku ekonomi masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga. Rumah tangga cenderung mencari alternatif barang yang lebih murah,

mengurangi frekuensi pembelian, bahkan menunda pembelian barang tahan lama. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap produk nonesensial sehingga omzet pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor perdagangan, ikut mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, melemahnya konsumsi masyarakat dapat mengurangi aktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan sektor riil (World Bank, 2024; Samuelson & Nordhaus, 2022).

c. Meningkatkan Kerentanan Ekonomi Rumah Tangga

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah merupakan kelompok yang paling terdampak oleh inflasi karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan harga pangan dan energi secara langsung mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga meningkatkan risiko kemiskinan dan kerentanan ekonomi (BPS, 2025; OECD, 2024).

Kerentanan ekonomi tersebut semakin meningkat apabila inflasi terjadi dalam waktu yang relatif lama tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Rumah tangga berpendapatan rendah memiliki kemampuan yang terbatas untuk melakukan penyesuaian pengeluaran karena hampir seluruh pendapatannya telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akibatnya, mereka lebih rentan mengalami penurunan kualitas konsumsi, kesulitan memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan berpotensi jatuh ke dalam kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial dan bantuan pemerintah menjadi instrumen penting dalam mengurangi dampak negatif inflasi terhadap kelompok masyarakat rentan (BPS, 2025; OECD, 2024).

d. Meningkatnya Ketimpangan Sosial

Inflasi tidak memberikan dampak yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat. Rumah tangga berpendapatan tinggi umumnya memiliki aset dan investasi yang mampu melindungi nilai kekayaannya dari inflasi. Sebaliknya, rumah tangga berpendapatan rendah lebih bergantung pada pendapatan tetap sehingga lebih rentan mengalami penurunan kesejahteraan. Kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan di masyarakat (World Bank, 2024).

Ketimpangan tersebut dapat memengaruhi stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin besar kesenjangan pendapatan, semakin besar pula perbedaan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakmerataan pembangunan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu diimbangi dengan kebijakan pemerataan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar dampak inflasi tidak semakin memperlebar kesenjangan sosial (World Bank, 2024).

e. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ketika daya beli masyarakat menurun akibat inflasi, konsumsi rumah tangga juga akan melemah sehingga berdampak pada perlambatan aktivitas produksi, penurunan investasi, dan berkurangnya pertumbuhan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2024).

Melemahnya konsumsi masyarakat akan memengaruhi berbagai sektor ekonomi karena permintaan terhadap barang dan jasa menjadi berkurang. Pelaku usaha cenderung mengurangi kapasitas produksi, menunda ekspansi usaha, bahkan melakukan efisiensi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan mengurangi pendapatan masyarakat sehingga menciptakan siklus perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga inflasi tetap berada pada tingkat yang rendah dan stabil menjadi salah satu prasyarat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bank Indonesia, 2024; IMF, 2024).

Selain dampak ekonomi secara langsung, penurunan daya beli juga dapat memengaruhi kondisi sosial masyarakat. Rumah tangga yang mengalami penurunan kemampuan konsumsi cenderung mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan yang bersifat investasi jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperlambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.4. Dampak Inflasi terhadap Berbagai Sektor Ekonomi

Dampak inflasi tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga oleh berbagai sektor ekonomi. Pada sektor rumah tangga, inflasi menyebabkan meningkatnya pengeluaran konsumsi dan menurunkan kemampuan menabung. Rumah tangga cenderung mengurangi konsumsi barang nonesensial untuk mempertahankan kebutuhan pokok.

Pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kenaikan harga bahan baku, energi, dan biaya distribusi meningkatkan biaya produksi sehingga margin keuntungan menjadi lebih kecil. Apabila pelaku usaha menaikkan harga jual, daya beli konsumen yang menurun dapat menyebabkan penurunan volume penjualan.

Pada sektor industri, inflasi meningkatkan biaya operasional perusahaan sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi, mengurangi kapasitas produksi, atau menyesuaikan harga jual produk. Sementara itu, pada sektor investasi, tingkat inflasi yang tinggi meningkatkan ketidakpastian ekonomi sehingga investor cenderung menunda investasi atau mengalihkan dananya ke instrumen yang dianggap lebih aman (IMF, 2024).

Di sektor keuangan, inflasi juga memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola aset dan tabungan. Ketika tingkat inflasi meningkat, nilai riil uang yang disimpan akan mengalami penurunan sehingga masyarakat cenderung mencari instrumen investasi yang mampu memberikan tingkat pengembalian di atas laju inflasi. Di sisi lain, lembaga keuangan perlu menyesuaikan tingkat suku bunga agar tetap mampu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak yang luas terhadap sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Dampak inflasi terhadap berbagai sektor ekonomi menunjukkan bahwa kenaikan harga tidak hanya memengaruhi aktivitas konsumsi masyarakat, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan dunia usaha dan stabilitas perekonomian nasional. Ketika biaya produksi terus meningkat, pelaku usaha akan menghadapi pilihan yang sulit, yaitu menaikkan harga jual produk atau mengurangi biaya operasional melalui efisiensi. Kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi terhadap pertumbuhan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan tingkat keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan daya saing sektor industri dan UMKM (Bank Indonesia, 2024; World Bank, 2024).

Selain itu, inflasi yang berlangsung dalam jangka panjang dapat mengurangi kepercayaan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian. Investor cenderung lebih berhati-hati dalam menanamkan modal karena tingginya ketidakpastian terhadap biaya produksi, tingkat suku bunga, dan kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan investasi, mengurangi penciptaan lapangan kerja, serta menurunkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta penguatan sektor riil untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (International Monetary Fund, 2024; Bank Indonesia, 2025).

3.5. Strategi Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi memerlukan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah. Dari sisi moneter, Bank Indonesia dapat mengendalikan inflasi melalui penyesuaian suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, serta pengelolaan likuiditas. Dari sisi fiskal, pemerintah dapat menjaga stabilitas harga melalui penguatan cadangan pangan, subsidi pada komoditas strategis, bantuan sosial kepada kelompok rentan, serta peningkatan efisiensi distribusi barang.

Selain itu, peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan ketahanan pangan nasional, digitalisasi rantai distribusi, serta koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas harga. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat dapat dipertahankan sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan (Bank Indonesia, 2024; BPS, 2025).

Keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya ditentukan oleh efektivitas kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Masyarakat diharapkan dapat melakukan konsumsi secara bijaksana serta menghindari perilaku panic buying yang dapat memicu kenaikan harga. Sementara itu, pelaku usaha perlu meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat manajemen rantai pasok, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menekan biaya operasional. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menciptakan stabilitas harga yang lebih berkelanjutan sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkesinambungan.

Optimalisasi strategi pengendalian inflasi juga memerlukan sistem pemantauan harga yang efektif dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi data harga dan distribusi pangan memungkinkan pemerintah memperoleh informasi secara lebih cepat mengenai potensi kelangkaan barang maupun kenaikan harga di berbagai daerah. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat, seperti pelaksanaan operasi pasar, distribusi stok pangan, maupun pemberian subsidi pada komoditas tertentu. Dengan sistem pemantauan yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan langkah antisipatif sebelum tekanan inflasi berkembang menjadi lebih besar (Bank Indonesia, 2025; Badan Pusat Statistik, 2025).

Di samping itu, pengendalian inflasi memerlukan upaya jangka panjang melalui peningkatan produktivitas nasional dan penguatan struktur ekonomi. Investasi pada sektor pertanian, industri pengolahan, serta infrastruktur logistik akan meningkatkan kapasitas produksi dan memperlancar distribusi barang sehingga risiko kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan dapat diminimalkan. Peningkatan literasi keuangan masyarakat juga menjadi faktor penting agar masyarakat mampu mengelola pengeluaran, tabungan, dan investasi secara lebih bijaksana pada saat terjadi tekanan inflasi. Dengan sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan

pembangunan sektor riil yang berkelanjutan, stabilitas harga dapat terjaga sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global (Bank Indonesia, 2025; OECD, 2024).

4. KESIMPULAN

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian pustaka, inflasi yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, seperti kenaikan harga pangan dan energi, fluktuasi nilai tukar, gangguan rantai pasok, serta dinamika ekonomi global. Apabila laju inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka pendapatan riil akan menurun sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa menjadi berkurang.

Dampak inflasi tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor industri, serta investasi. Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan perubahan pola konsumsi, meningkatnya kerentanan ekonomi kelompok berpendapatan rendah, berkurangnya aktivitas ekonomi, dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku usaha melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, penguatan ketahanan pangan, perbaikan sistem distribusi, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Dengan inflasi yang terjaga pada tingkat yang stabil, daya beli masyarakat dapat dipertahankan sehingga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh, aktivitas ekonomi meningkat, dan pembangunan ekonomi nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan studi kepustakaan sehingga belum menganalisis hubungan inflasi dan daya beli masyarakat menggunakan data empiris atau pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data time series atau data panel dengan metode ekonometrika agar dapat mengukur besarnya pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia secara lebih akurat.

REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2025). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Indonesia Tahun 2025*. Badan Pusat Statistik.
- [3] Bank Indonesia. (2024). *Kajian Stabilitas Keuangan* (No. 42). Bank Indonesia.
- [4] Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- [5] Bank Indonesia. (2025). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I Tahun 2025*. Bank Indonesia.
- [6] Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- [7] Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2021). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- [8] International Monetary Fund. (2024). *World Economic Outlook: Steady but Slow*. International Monetary Fund.
- [9] Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- [10] Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- [11] Mishkin, F. S. (2022). *The economics of money, banking, and financial markets* (13th ed.). Pearson.
- [12] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD Economic Outlook 2024*. OECD Publishing.
- [13] Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2021). *Microeconomics* (9th ed.). Pearson.
- [14] Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2022). *Economics* (20th ed.). McGraw-Hill Education.
- [15] Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- [16] Sukirno, S. (2022). *Makroekonomi: Teori pengantar* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- [17] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- [18] World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Investing in Inclusive Growth*. World Bank.
- [19] World Bank. (2024). *Poverty and Equity Brief: Indonesia*. World Bank.
- [20] Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). Sage Publications.